



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT ATAS  
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN MITRA  
DI KANWIL KEMENKUMHAM KALTIM TAHUN 2023**

**A. Pendahuluan**

1. Umum

Bahwa penataan kerja sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan kerja sama, sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pelaksanaan kerja sama di Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim telah berjalan dengan lancar, dimana tahun 2023 Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim telah melaksanakan 8 (delapan) Kerja Sama dengan Mitra, yang akan di bahas pelaksanaannya pada laporan ini.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari laporan ini adalah monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut atas evaluasi pelaksanaan kerja sama di Kanwil Kemenkumham Kaltim pada tahun 2023.

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama di Kanwil Kemenkumham Kaltim.

3. Ruang Lingkup

Monev dan Tindak Lanjut atas evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan mitra di Kanwil Kemenkumham Kaltim tahun 2023

#### 4. Dasar

- a. Permenkumham No. 31 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan HAM ;
- b. Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham RI;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### **B. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

- 1) Kanwil Kemenkumham Kaltim telah melaksanakan 8 kerja sama pada 6 mitra di tahun 2023, serta implementasinya dengan rincian sebagai berikut :  
(*Halaman selanjutnya*)

NO.	Judul Kerja Sama	Mitra	Jenis Kerja Sama	Hasil Implementasi																				
1.	Kerja Sama Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemerintah Kabupaten Paser	MoU	<p>1. Pelaksanaan pendampingan layanan hukum terkait AHU (Administrasi Hukum Umum)</p> <p>1. Bidang Layanan Hukum (AHU)</p> <table border="1" data-bbox="1318 532 1921 982"> <thead> <tr> <th data-bbox="1318 532 1360 565">NO</th> <th data-bbox="1360 532 1480 565">INSTANSI</th> <th data-bbox="1480 532 1606 565">TANGGAL</th> <th data-bbox="1606 532 1816 565">DOKUMENTASI</th> <th data-bbox="1816 532 1921 565">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1318 565 1360 722">1</td> <td data-bbox="1360 565 1480 722">Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Dekranasda</td> <td data-bbox="1480 565 1606 722">02 Oktober 2023</td> <td data-bbox="1606 565 1816 722"></td> <td data-bbox="1816 565 1921 722">Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1318 722 1360 873">2</td> <td data-bbox="1360 722 1480 873">Notaris</td> <td data-bbox="1480 722 1606 873">22 s.d 25 Mei 2023</td> <td data-bbox="1606 722 1816 873"></td> <td data-bbox="1816 722 1921 873">Pembinaan dan Pengawasan Notaris</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1318 873 1360 982">3</td> <td data-bbox="1360 873 1480 982">Notaris</td> <td data-bbox="1480 873 1606 982">12 Agustus 2023</td> <td data-bbox="1606 873 1816 982"></td> <td data-bbox="1816 873 1921 982">Pembinaan dan Pengawasan Notaris</td> </tr> </tbody> </table>	NO	INSTANSI	TANGGAL	DOKUMENTASI	KETERANGAN	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Dekranasda	02 Oktober 2023		Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan	2	Notaris	22 s.d 25 Mei 2023		Pembinaan dan Pengawasan Notaris	3	Notaris	12 Agustus 2023		Pembinaan dan Pengawasan Notaris
NO	INSTANSI	TANGGAL	DOKUMENTASI	KETERANGAN																				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Dekranasda	02 Oktober 2023		Pendampingan Pendaftaran Perseroan Perorangan																				
2	Notaris	22 s.d 25 Mei 2023		Pembinaan dan Pengawasan Notaris																				
3	Notaris	12 Agustus 2023		Pembinaan dan Pengawasan Notaris																				

## 2. Pelaksanaan pendampingan bidang hukum (Harmon Raperda)

### 2. Bidang Hukum (Harmon Raperda)

NO	INSTANSI	TANGGAL	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1	Sekretariat DPRD	15 Juni 2023		Konsultasi dan pembahasan terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
2	Sekretariat DPRD	25 Agustus 2023		Konsultasi dan pembahasan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3	Sekretariat DPRD	20 November 2023		Konsultasi dan pembahasan Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Desember 2023		Konsultasi dan pembahasan terkait Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa
5	Sekretariat DPRD	7 Desember 2023		Finalisasi Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

				<p>3. Terkait bidang hukum (JDIH)</p> <p>3. Bidang Hukum (JDIH)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>INSTANSI</th> <th>TANGGAL</th> <th>DOKUMENTASI</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bagian Hukum Setkab Paser</td> <td>07 Desember 2023</td> <td></td> <td>Konsultasi dan Pembahasan Usulan Desa Sadar Hukum</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bagian Hukum Setkab Paser</td> <td>23 Juni 2023</td> <td></td> <td>Pembahasan Verifikasi Usulan Desa Sadar Hukum</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Bagian Hukum Setkab Paser</td> <td>14 November 2023</td> <td></td> <td>Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Binaan Di Kab. Paser</td> </tr> </tbody> </table>	NO	INSTANSI	TANGGAL	DOKUMENTASI	KETERANGAN	1	Bagian Hukum Setkab Paser	07 Desember 2023		Konsultasi dan Pembahasan Usulan Desa Sadar Hukum	2	Bagian Hukum Setkab Paser	23 Juni 2023		Pembahasan Verifikasi Usulan Desa Sadar Hukum	3	Bagian Hukum Setkab Paser	14 November 2023		Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Binaan Di Kab. Paser
NO	INSTANSI	TANGGAL	DOKUMENTASI	KETERANGAN																				
1	Bagian Hukum Setkab Paser	07 Desember 2023		Konsultasi dan Pembahasan Usulan Desa Sadar Hukum																				
2	Bagian Hukum Setkab Paser	23 Juni 2023		Pembahasan Verifikasi Usulan Desa Sadar Hukum																				
3	Bagian Hukum Setkab Paser	14 November 2023		Pembinaan Kadarkum dan Kelurahan Binaan Di Kab. Paser																				
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Pemerintah Kabupaten Paser	MoU	<p>1. Terlaksananya PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser tentang perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual.</p> <p>2. Pelaksanaan pendampingan Layanan Hukum pada tanggal 23 Mei 2023.</p>																				

				 
3.	Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	MoU	Terlaksananya PKS Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutim.
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Perdagangan Kota Balikpapan	PKS	Layanan Kekayaan Intelektual pada Dinas Perdagangan kota Balikpapan.

				<p>DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KOLABORASI DENGAN DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN</p> 
5.	Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser	PKS	Terlaksananya sosialisasi layanan Kekayaan Intelektual.

				
6.	<p>Perlindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Paser</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Paser</p>	<p>PKS</p>	<p>Layanan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser</p>

				<p>DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN DINAS PARWISATA DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER</p>   
7.	Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual	Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur	PKS	Layanan Kekayaan Intelektual dengan BRIN Kabupaten Kutim

				<p>DOKUMENTASI KEGIATAN LAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR</p> 
8.	Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan	PKS	<p>Terlaksananya workshop Kekayaan intelektual</p> 

- 2) Berdasarkan tabel, bahwa setelah penandatanganan kerja sama, telah dilaksanakan dan diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sehingga pelaksanaan kerja sama telah berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tersebarnya layanan hukum di wilayah Kalimantan timur.
- 3) Dari monitoring dan evaluasi yang telah di dapatkan, Kanwil Kemenkumham Kaltim telah menindaklanjuti pelaksanaan kerja sama. Dikarenakan pelaksanaan kerja sama lebih dari 1 tahun maka monev tetap dilaksanakan pada tahun 2024, sambil menambah rencana kerja sama dengan mitra lainnya.

### **C. Hasil yang dicapai**

- Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 8 kerja sama dengan 6 mitra pada tahun 2023, yakni : 2 MoU dan 1 PKS dengan Pemkab Paser, 1 MoU dengan Pemkab Kutim, 1 PKS dengan Dinas Perdagangan kota Balikpapan, 1 PKS dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser, 1 PKS dengan BRIN Kab. Kutai Timur serta 1 PKS dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan;
- Terwujudnya kerja sama yang baik dengan antar mitra;
- Tersebarnya pelayanan hukum wilayah Kalimantan Timur.

### **D. Simpulan dan Saran**

#### **I. Simpulan :**

Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim telah melaksanakan 8 kerja sama pada 6 mitra di wilayah Kalimantan Timur di tahun 2023. Dari hasil monitoring dan evaluasi, pelaksanaan kerja sama dengan 6 mitra telah berjalan dengan baik dalam bentuk pendampingan layanan hukum dan layanan kekayaan intelektual setelah menandatangani nota kesepahaman / MoU dan perjanjian kerja sama.

#### **II. Saran :**

Agar pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2023 serta dilaksanakan juga di wilayah Kalimantan Utara.

## E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan masukan yang akan datang.

Mengetahui

Kasubbag Humas, RB dan TI



Riandi Tampubolon  
NIP. 19840804 200912 1 008

Dibuat di Samarinda

Pada tanggal 2 Januari 2024

Pengelola Jaringan Dokumentasi



O. Rocky Fernandes  
NIP. 19860202 201901 1 001